

TURNITIN-ISLAM INDONESIA: THE ORIENTATION OF WORLD ISLAMIC STUDIES AND CONTRIBUTION TO GLOBAL CIVILIZATION

by Nurul Infitah

Submission date: 04-Feb-2022 05:40AM (UTC-0800)

Submission ID: 1754826884

File name: Islam_Indonesia_2.docx (54.95K)

Word count: 3302

Character count: 21958

15

ISLAM INDONESIA: THE ORIENTATION OF WORLD ISLAMIC STUDIES AND CONTRIBUTION TO GLOBAL CIVILIZATION

Ahmad Hifni

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ahmad.hifni@uinjkt.ac.id

14

Syarifaeni Fahdiah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
fenyfahdiah@gmail.com

Nurul Infitah

Universitas Negeri Yogyakarta
nurul0021pasca.2020@student.uny.ac.id

Fathan Fihrisi

Universitas Jember
760019019@mail.unej.ac.id

Abstract

The world increasingly recognizes Indonesia as the largest Muslim country and as the third democracy after India and the United States. Indonesia is also known as a country whose Islamic style is washatiyah, namely Muslims or Muslims who are in the middle, balanced, do not stand at extreme poles, both in understanding and experience Islam. With this position and status, it is not surprising that many people hope that Indonesia can play a more prominent important role in the international arena. The expected roles include providing scientific contributions, spreading Washatiyah Islam, and empowering democracy in the Muslim world. This paper aims to illustrate the importance of promoting Indonesian Islam to global civilization. It is no longer relevant that the face of Indonesian Islam is oriented to the Middle East, but those who must visit Indonesia by absorbing the oxygen of diversity are still relatively in the spirit of togetherness. This research is a literature study by reviewing the relevant literature. Indonesian Islam has a different style and response to Islam that developed in other regions. This difference in Indonesian Islam occurs

because a specific area has a culture, customs, and social construction, unlike other regions

Keyword: *Islam Indonesia, Islam Washatiah, Democracy, Global Civilization*

PENDAHULUAN

Islam di Indonesia memiliki corak dan karakteristik yang berbeda dengan Islam di daerah lain. Perbedaan Islam ini muncul karena daerah tertentu memiliki budaya, adat istiadat dan struktur sosial yang tidak sama dengan yang lain. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai perairan alam yang subur dengan berbagai suku, bahasa dan budaya yang berbeda. Keberagaman ini memungkinkan Islam untuk menyerap budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Budaya, nilai dan falsafah yang terkandung di dalamnya membedakan Islam Indonesia dengan Islam yang berkembang di daerah lain dan menjadikan Islam Indonesia unik (*distingtif*).

Sebagai negara berpenduduk terpadat di dunia, Indonesia hadir sebagai alternatif keberislaman yang moderat, damai dan jauh dari ekspresi keberislaman yang keras dan konfliktual. Secara politik, Indonesia bukanlah negara agama atau negara Islam, namun bukan berarti Islam yang berkembang di Indonesia tidak murni, melainkan Islam Indonesia yang memiliki sifat damai dan anti-sesis tidak berhasil. Tidak hanya itu, nilai-nilai Islam malahan sama sekali tidak bertentangan dengan berbagai budaya dan bahkan melembaga membentuk perilaku muslim yang terbuka terhadap perbedaan.

Realitas ini lahir karena negeri Islam Indonesia dibangun para ulama dengan pendekatan sufisme.¹ Pendekatan sufisme yang mengajarkan Islam secara substantif (esensial) menghasilkan pemahaman Islam yang bersifat

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Prenada Media Group: Depok, 2013)

ramah dan rahmah. Para wali yang menyebarkan Islam di Indonesia mewariskan keteladanan bahwa Islam bisa toleran dan hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda-beda agama, suku, dan ras. Popularitas wayang ciptaan Wali Songo di Jawa menjadi bukti bahwa Islam bisa mengakomodir budaya apapun.² Padahal wayang dengan legenda-legendanya yang berasal dari negeri India yang berbudaya Hindu, namun di Indonesia bisa diakomodir oleh Islam sebagai alat dakwah yang cukup efektif dalam penyebaran Islam.

Robert Hefner³, seorang antropolog kondang mengamini hal itu, bahwa pluralitas budaya merupakan realitas yang tidak bisa dinafikkan di Indonesia. Keberagaman itu tercermin dari 656 etnis baik yang besar maupun yang kecil yang mampu hidup berdampingan di wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dianugerahi budaya, tradisi dan adat-istiadat bahkan ratusan bahasa dan dialek lokal yang bermacam-macam. Realitas ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kearifan lokal dan budaya yang sangat beragam. Dengan posisi itu, Islam Indonesia cukup relevan untuk memberikan sumbangsinya bagi peradaban global.

Islam Washatiyah

Secara umum, umat Islam Indonesia termasuk dalam kelompok yang disebut Ummatan Wasatan. Singkatnya, dia adalah kelas menengah yang seimbang dan seorang Muslim yang tidak melakukan ekstrem baik dalam

² M. Bambang Pranowo, 'Budaya Jawa, Dan Toleransi Beragama (Sebuah Refleksi)', *Maarif*, 9.2 (2014), 1–14.

³ Robert W. Hefner, *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization* (Princeton: Princeton University Press, 2005). Lihat juga: Robert W. Hefner, *Islamization and Democratization in Indonesia* (Hawaii: University of Hawaii Press, 1997)

praktik atau pemahaman Islam.⁴ Keadaan ini menemukan relevansinya, terutama setelah peristiwa serangan terorisme terbesar di awal abad 21, 11 September 2001 di Amerika, kaum Muslim dan Islam menjadi tertuduh dalam sejumlah peristiwa terorisme mematikan di berbagai penjuru dunia, baik yang dilakukan oleh personal maupun kelompok tertentu. Maka dari itu, pemahaman Islam yang moderat dan penjelasan yang baik tentang Islam yang hakiki menjadi sangat penting diketahui oleh publik internasional, dan Indonesia sebagai cermin dari entitas umat Islam yang *wasatan* itu.

Aktualisasi *wasatiyah* Indonesia itu tampak pada karakter negara Indonesia yang berdiri pada 17 Agustus 1945. Para pendiri bangsa dari berbagai kelompok bersepakat untuk mendirikan Indonesia bukan sebagai negara yang sekuler dan bukan pula sebagai negara berdasarkan agama Islam.⁵ Esensi sikap tengah itu terdapat dalam kandungan Pancasila sebagai *common platform/ kalimatun sawa*, suatu prinsip-prinsip yang sama dan setara di antara masyarakat Indonesia yang beragam dalam berbagai segi kehidupan.

Islam *wasatiyah* juga mewujud dalam level kemasyarakatan, terutama dalam ormas-ormas keislaman yang berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PUI, Mathla'ul Anwar, Nahdlatul Wathan, al-Washliyah dan sebagainya. Berbagai ormas keislaman tersebut memilih jalan tengah *wasatiyah* baik dalam prinsip pemahaman keagamanya maupun dalam sikap sosial dan politiknya.

Organisasi-organisasi Islam *wasatiyah* ini memainkan peran penting, yang disebut oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai “Islam Kultural” sejak masa Orde Baru yang kemudian melahirkan fenomena “kebangkitan

⁴Mohammad Hasan, ‘Wasatiyyah Islam in The Framework Pesantren Education Tradition’, *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 26, No.2 (Desember 2018), 94-177. Lihat: QS. Al-Baqarah/ 2: 143)

⁵Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, Cetakan III, 2011)

Islam”. Hal ini ditandai dengan meluasnya pemakaian jilbab di kalangan perempuan; lahirnya lembaga-lembaga berbasis keislaman seperti Bank Syariah Indonesia; tumbuh dan berkembangnya jumlah jamaah haji dan umroh, berlimpahnya masjid-masjid yang bagus dan indah; tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan perguruan tinggi.

Di tengah perubahan sosial-politik di Indonesia, organisasi *wasatiyah* tersebut tetap dalam komitmennya untuk tetap setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai titik-temu bagi pluralisme masyarakat di Indonesia. Selain itu, organisasi *Islam Washatiyah* menjadi pondasi bagi perkembangan *civil society* yang esensial bagi demokrasi yang baik.⁶ Bukan hanya sekadar program kesejahteraan masyarakat, akan tetapi organisasi *wasatiyah* ini turut berkontribusi bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi di Indonesia.

Islam Indonesia dan Demokrasi

Dalam konteks global, hubungan antara demokrasi dan Islam menarik perhatian banyak sarjana Barat. Antara Islam dan demokrasi, terdapat perbedaan karakteristik peradaban yang sama sekali berbeda, baik dalam tradisi, norma, maupun akarnya. Para sarjana Barat sangat skeptis terhadap keharmonisan antara Islam dan demokrasi, seperti Huntington (1997), Fukuyama (1992), Lewis (2002) dan Lipset (1994). Namun, sebagian ulama lain mengetahui bahwa ada persamaan dan kesesuaian mendasar antara demokrasi dan Islam. Sakedina (2000), Harga (1999), Hofner (2005), Katab dan Buma (2007).⁷

⁶Azyumardi Azra, *Islam Indonesia, Kontribusi Pada Peradaban Global*.

⁷Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (New York: Macmillan, 1992); Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia* (New Jersey: Princeton University Press, 2000); Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations*,

Penolakan terhadap kesesuaian antara Islam dan demokrasi juga muncul dari kalangan muslim yang cenderung berpaham fundamentalisme. Islam dinilai tidak hanya sebagai agama, akan tetapi juga diyakini mempunyai nilai-nilai sendiri berdasarkan ajaran keagamaan yang bersumber dari kitab suci al-Quran. Sehingga Islam dinilai dapat berkembang sebagai sebuah peradaban luhur dan maju tanpa harus terpengaruh peradaban lain di luar agama Islam.⁸ Dengan kata lain, Islam tak perlu terlibat lebih jauh dengan nilai-nilai dan peradaban yang berasal dari luar Islam.

Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum parlemen dan presiden yang damai dan relatif bebas konflik pada tahun 1999, 2004, 2009, 2016 dan 2019 mendukung tercapainya keselarasan antara demokrasi dan Islam. Hal ini disebabkan partisipasi umat Islam yang besar dalam proses politik demokrasi Indonesia, termasuk partai-partai Islam dan non-Islam. Indonesia, negara-bangsa Islam terbesar di dunia, adalah contoh masalah nyata antara Islam dan demokrasi, tetapi keduanya terkait erat.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pertumbuhan demokrasi di Indonesia telah menarik perhatian dan minat banyak sarjana dan peneliti di seluruh dunia. Banyak studi demokrasi di dunia Islam cenderung menyimpulkan bahwa ada masalah antara demokrasi dan Islam di banyak negara yang didominasi Muslim. Sementara itu, di Indonesia sendiri tidak demikian, meskipun pada mulanya sebagian pengamat cenderung pesimis melihat perkembangan dan pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Dalam

¹⁰ *Remaking of The World Order* (New York: Simon and Schuster, 1997); Bernard Lewis, *What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response* (Oxford: Oxford University Press, 2002); Daniel E. Price, *Islamic Political Culture, Democracy and Human Right: A Comparative Study* (London: Praeger, 1999); Seymour Martin Lipset, *The Social Requisites of Democracy Revisited*, 1994; Sayed Khatab and Gary D. Bouma, *Democracy Islam* (London and New York: Routledge, 2007).

⁸ Sayyid Qutb, *Petunjuk Jalan* (Jakarta: Media Dakwah, 2000).

waktu dua dekade terakhir konsolidasi dan pertumbuhan demokrasi terus berlanjut di Indonesia.⁹

Di dunia Muslim, mengembangkan demokrasi memang tidak mudah dan hambatannya cukup menantang. Hal itu tak lepas karena sejumlah faktor seperti kondisi ekonomi yang lemah, keterbelakangan dalam pendidikan, dan modal sosial yang relatif tidak solid. Sehingga dalam diskursus demokrasi, belum ada negara Muslim di dunia yang dianggap menjadi contoh ideal bagi tumbuh berkembangnya demokrasi. Mungkin yang sering dianggap baik adalah Turki, akan tetapi negara ini menganut demokrasi sekuler yang sebagian pengamat melihat cenderung bermusuhan dengan agama.

Di Indonesia tentu saja berbeda dengan Turki. Demokrasi Indonesia tidak anti agama. Pancasila sendiri dengan jelas menyatakan bahwa ketuhanan adalah prinsip yang harus dipatuhi oleh bangsa Indonesia. Namun, Indonesia bukanlah negara agama atau negara Islam. Islam bukanlah agama negara, meskipun Islam merupakan mayoritas di Indonesia. Fakta ini meneguhkan kecenderungan umat Islam Indonesia yang moderat, *wasatiyah* dengan nilai toleransi yang tinggi terhadap perbedaan golongan lain. Oleh karena itu, Indonesia adalah contoh yang paling ideal dalam berdemokrasi yang seringkali disebut oleh banyak pengamat, khususnya setelah peralihan dari era otoritarianisme Orde Baru ke era keterbukaan Reformasi.¹⁰

Kesuksesan Indonesia dalam membangun dan mengembangkan demokrasi dengan cukup stabil menjadi angin segar bagi diskursus Islam dan

⁹ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy: Dynamic in a Global Context* (Jakarta & Singapore: ICIP, TAF, Equinox-Solstice, 2006).

¹⁰ Masykuri Abdillah, 'Religion and Democracy: The Compatibility of Islam and Democracy'; Hamid Slimi, 'Islam and Democracy: Compatibility and Complexity'; Julian Millie, 'National Citizenship and Islam with the Body'. Lihat juga Masykuri Abdillah, 'Theological Responses to the Concepts of Democracy and Human Right: The Case of Contemporary Indonesian Muslim Intellectuals', *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* Volume 3, No.1

demokrasi. Sebab, negara-negara berbasis mayoritas muslim lainnya tampaknya masih menghadapi berbagai kesulitan. Selama ini dunia Islam dinilai oleh banyak kalangan sebagai tanah yang tak subur bagi tumbuhnya demokrasi. Samuel Huntington dalam *Clash of Civilizations*¹¹ melihat budaya Islam sebagai hambatan karena doktrin kuat yang tertutup untuk perkembangan budaya lain.

Pengamat lain seperti Oliver Roy melihatnya sebagai kegagalan politik Islam dalam membangun sistem politik yang stabil. Menurutnya faktor struktural amat berpengaruh karena keseimbangan pertumbuhan demografis dan perkembangan ekonomi tidak berjalan dengan baik dan itu lumrah terjadi di negara-negara ketiga. Sementara John Sidel menganggap kegagalan itu karena *counter-discourse*, pengaruh aktor politik Islam yang tidak simetris dengan politik internasional.

Dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk muslim lainnya, Indonesia relatif jauh dari ketiga jebakan historis di atas. Malahan, Indonesia dapat membangun sistem politik berdasarkan kehendak masyarakat umum. Juga, beberapa kalangan menyangkal bahwa keberhasilan Indonesia tidak terlepas dari aktor politik Islam yang bisa menyelaraskan doktrin agama Islam dengan sistem yang berkembang di budaya lain. Hal itu tampak misalnya ketika masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi, aktor-aktor politik Muslim menjadi figur utama yang mewarnai sekaligus mendorong terciptanya demokratisasi di Indonesia.

Oleh karena itu, Islam Indonesia patut menjadi contoh dalam praktik berdemokrasi bagi negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Hal itu karena beberapa faktor. Pertama, Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah dan dasar dalam bernegara. Pancasila menjadi konsensus dari berbagai kepentingan yang ada, seperti arus ideologi politik, keragaman suku, etnik dan bahkan agama. Pancasila adalah pondasi yang dibangun oleh para pendiri

bangsa yang turut mendukung berkembangnya demokrasi yang meniscayakan kompetensi, perdebatan dan pergulatan.

Kedua, Indonesia memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang mencerminkan kebersamaan sebagai suatu bangsa dalam merajut kekuatan dan persatuan bersama. Sebenarnya, spirit persatuan dalam keberagaman sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat dalam tata kehidupan masyarakat Nusantara, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut J.S. Furnival, pada tahun 30-an dan 40-an bangsa Eropa masih menghadapi persoalannya dengan kebhinekaan. Dan pada saat itu, Indonesia telah hidup dalam kerukunan dalam keberagaman. Kebhinekaan di Indonesia tidak hanya dalam bentuk pemahaman, tetapi juga dalam pengamalannya.¹¹ Puncak dari kesadaran itu tampak pada disepakatinya Pancasila sebagai falsafah dalam bernegara.

Ketiga, kultur masyarakat Indonesia yang demokratis diikuti dengan kearifan lokal yang kuat turut mendorong terwujudnya transisi demokrasi yang baik. Kolektivisme yang muncul dalam tradisi Gotong-Royong telah menjadi lanskap sosial, politik, dan budaya yang memungkinkan demokrasi lebih dari sekadar tempat untung-rugi (*zero-sum game*). Demokrasi pada intinya adalah upaya untuk menyeimbangkan pusat kekuasaan di semua lini. Pendiri negara, Muhammad Hatta, mengatakan bahwa demokrasi Indonesia berakar kuat pada tradisi persatuan, ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, dan pertumbuhan orang yang disumbangkan oleh kebangsaan. Hatta menekankan bahwa demokrasi kuat karena tiga alasan, termasuk sosialisme yang berkontribusi terhadap, nilai-nilai kemanusiaan berakar.¹²

¹¹ Robert W. Hefner, *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization* (Princeton: Princeton University Press, 2005).

¹² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, III (Jakarta: Gramedia, 2011).

Keempat, tradisi demokrasi yang didukung oleh masyarakat sipil, yang berperan dalam membangun etika publik serta menyeimbangkan dan mengelola kebijakan nasional. Robert W. Hefner menyebut unit ini "Civil Islam".¹³ Masyarakat sipil melihat kesetaraan, kebebasan dan demokrasi bukan hanya tradisi yang berasal dari Barat, tetapi juga prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam ajaran Islam. Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah cukup berpengaruh dalam memainkan peranannya, baik secara vertical berupa kontrol terhadap negara, maupun secara horizontal, yakni pemberdayaan terhadap masyarakat. Dua ormas keagamaan terbesar ini sangat membantu dalam membangun transisi demokrasi yang baik di Indonesia.

Tidak hanya itu, dua ormas tersebut menjadi rujukan dalam pemahaman keislaman dan sebagai gambaran muslim *mainstream* di Indonesia. Kedua kelompok ini juga dianggap sebagai representasi dari pemikiran Islam moderat dengan merujuk pada ciri khasnya dalam menyebarkan pemahaman keislaman yang moderat. Hal itu tercermin misalnya dalam sikapnya yang mentoleransi perbedaan dalam berpendapat, mengutamakan kompromi dan dialog sebagai strategi dakwahnya, dan yang paling utama menolak kekerasan dan segala bentuk ekstremisme berbasis kekerasan. Gagasan Islam moderat sebenarnya juga mencakup pada gagasan pemikiran Islam seperti Islam rasional, Islam toleran, Islam Pribumi, Islam inklusif, Islam progresif, Islam transformatif, dan Islam pluralis.

Dalam membangun perannya, NU dan Muhammadiyah lebih banyak aktif dalam proses penguatan *civil society* dan pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai Badan Otonomnya, NU melakukan advokasi, workshop, seminar, dan berbagai diskusi lainnya. Berbagai aktivitasnya itu tak lepas dari

¹³ Robert W. Hefner, 'Public Islam and the Problem of Democratization, *Journal Sociology of Religion*', *Journal Sociology of Religion*, 62.4 (2011). Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton University Press, 2000)

isu-isu pemberdayaan masyarakat seperti kajian mengenai gender, penanaman dan penguatan demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan sampai perihal pluralisme dan toleransi.

Peran semacam itu juga dilakukan Muhammadiyah, terutama dalam fokusnya membangun pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Nakamura,¹⁴ peranan Muhammadiyah tersebut tercermin dalam tiga hal. *Pertama*, pemberdayaan dan dedikasinya terhadap masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan *bottom-up*. *Kedua*, demokratisasi di organisasi Muhammadiyah dalam pengambilan keputusan. *Ketiga*, penanaman dalam nilai-nilai toleransi, keterbukaan, dalam pluralisme dalam agama.

Kiblat Keilmuan Islam Dunia

Posisi strategis Indonesia dalam membangun iklim demokrasi yang baik dan keberislaman yang moderat menemukan relevansinya ketika geopolitik global, terutama di negara-negara konflik Timur Tengah (*Middle East*), konflik dan peperangan tak kunjung usai. Negara-negara seperti Yaman, Irak, Suriah, Lebanon dan baru-baru ini di Afghanistan menunjukkan konflik yang berkepanjangan. Padahal Timur Tengah dalam sejarahnya menjadi kiblat Islam dunia, bahkan tak sedikit pelajar Indonesia yang menimba ilmu di sana.

Sejumlah intelektual-ulama Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah tampak pada pendiri ormas NU dan Muhammadiyah, yakni Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga pernah belajar di sana, dan belum lagi ulama-ulama generasi sebelumnya seperti Nuruddin al-Raniri, Hamzah Fansuri, Muhammad Arsyad al-Banjari, Syeikh Abdurrahman Rauf al-Sinkili, Abdu Samad al-Palimbani, Syamsuddin al-Sumatrani, Muhammad

¹⁴ Mitsou, Nakamura et al (eds), *Islam and Civil Society in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001)

Nafis al-Banjari, Mahfudh al-Tirmasi, Syeikh Nawawi al-Bantani dan masih banyak ulama-ulama lainnya.¹⁵

Sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir Timur Tengah masih dilanda konflik sektarianisme yang berkepanjangan. Sehingga banyak menimbulkan pertanyaan, apakah masih relevan menjadi sentral keislaman dunia. Sejumlah kalangan melihat dengan skeptis karena tidak mungkin pendidikan dan pembelajaran akan efektif di tengah prahara dan konflik yang tak berkesudahan. Konsekuensi dari adanya konflik adalah instabilitas dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan dan kebudayaannya. Kondisi demikian tidak mungkin ideal dalam pengembangan studi keilmuan.

Kondisi politik yang memanas secara otomatis tidak mungkin membawa pembelajaran yang efektif karena kurikulum, para pengajar dan perangkat-perangkatnya pasti turut terlibat dalam pusaran konflik. Semua akan terbingkai dalam konflik sektarianisme yang kuat di antara berbagai kelompok yang ada. Bahkan tidak bisa dinafikan bila konflik sektarianisme itu kemudian dibingkai dalam bentuk ideologi negara. Apalagi konflik itu menjelma menjadi konflik keagamaan seperti fenomena munculnya *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*, al-Qaeda, dan organisasi-organisasi ekstrem berbasis kekerasan lainnya. Dalam keadaan seperti itu, maka sektarianisme agama dan propaganda konflik sangat berpotensi terjadi.

Maka dari itu, sesungguhnya dibutuhkan suatu model dan kiblat keilmuan Islam baru yang dapat memberi warna baru bagi peradaban dunia. Tidak hanya dalam lembaga-lembaga pendidikan yang terbuka dan damai, tetapi juga dalam hal pemahaman dan pengamalan Islam yang moderat, toleran dan terbuka bagi perkembangan dunia. Untuk menjawab tantangan itu, Indonesia patut dipertimbangkan sebagai model dan muara keberislaman dunia.

¹⁵Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Prenada Media Group: Depok, 2013)

Beberapa alasannya antara lain, pertama, Indonesia memiliki lembaga pendidikan keislaman seperti pesantren dan Perguruan Tinggi yang menyebar di berbagai daerahnya.

Perguruan Tinggi semacam UIN, IAIN, dan Perguruan Tinggi Islam swasta seperti Universitas Muhammadiyah dan Universitas Nahdlatul Ulama telah banyak bermunculan dan perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup pesat. Selain itu, Indonesia juga memiliki ribuan pesantren yang tersebar dan secara umum tidak mengalami bipolaritas antara kehidupan keduniaan dan agama. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut relatif tidak terlibat dalam konflik sektarianisme dan konflik ideologi keagamaan, sehingga ideal menjadi laboratorium dan muara keislaman dunia.

Kedua, ulama-ulama dan tokoh agama di Indonesia memiliki *track record* sebagai panutan dalam berlangsungnya keberagaman yang moderat dan terbuka. Para ulama itu tidak hanya berkontribusi bagi tumbuh dan berkembangnya Islam yang moderat, tetapi juga memiliki latar belakang disiplin ilmu yang kaya dan beragam. Ulama-ulama di Indonesia juga tidak terikat dengan misi aliran keagamaan tertentu yang radikal dan intoleran. Meskipun secara umum berpaham Sunni, tetapi tetap terbuka dan menghormati perbedaan dalam kelompok lain.

Para ulama di Indonesia juga berpikir inklusif terhadap keilmuan-keilmuan baru yang bersumber dari peradaban modern, baik keilmuan yang berkembang di Timur maupun di Barat. Ini menjadi ideal mengingat ulama-ulama yang berada di lingkaran konflik justru sangat rentan dengan konflik sektarianisme keagamaan dan cenderung melihat ketidakcocokan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu sekuler.

Ketiga, Indonesia makin maju dalam membangun kurikulum pendidikan yang mendukung terciptanya corak muslim yang moderat. Kurikulum yang ada tidak tercemari oleh narasi intoleransi dan radikalisme

sehingga pendidikan memainkan peran yang amat vital terhadap pemahaman Islam di Indonesia. Meski demikian, tantangannya bukan berarti tidak ada. Sejumlah lembaga pendidikan yang disponsori oleh ideologi transnasional masih kerap kali didapati di sejumlah tempat. Biasanya ideologi ekspor dari luar inilah yang menyuarakan eksklusifisme dan kerap kali memberikan label kafir terhadap kelompok minoritas dan mayoritas mainstream.

Kehadiran NU dan Muhammadiyah menjadi benteng ekstremisme dan infiltrasi paham keagamaan yang eksklusif tersebut. Selama dua ormas keislaman terbesar itu solid dan tetap pada komitmennya menjaga NKRI, maka ideologi ekstrem dan sektarianisme sudah pasti tidak mungkin menjadi mainstream sehingga Indonesia masih aman dari ancaman-ancaman ideologi radikal itu.

Keempat, Indonesia merupakan negara mayoritas Islam terbesar di dunia dengan warisan budaya dan kultur yang luhur. Kenyataan itu menjadi sintesis dari peradaban Barat dan Timur, antara liberalisme demokrasi dan universalisme ajaran Islam sehingga membentuk Islam yang moderat yang dapat beriringan antara pengamalan Islam dan demokrasi. Selain itu, Islam Indonesia menyimpan begitu banyak referensi-referensi untuk melihat secara konstruktif isu-isu yang berkembang seperti demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, pluralisme, toleransi, kesetaraan jender dan hubungan antar umat beragama.

Dari berbagai argumen di atas, maka orientasi keislaman yang mengarah pada Timur Tengah patut direnungkan ulang. Sudah saatnya memulai diwacanakan bahwa pembelajaran Islam di Timur Tengah bukan lagi pilihan yang paling ideal. Hal itu karena kurikulum dan pendidikan yang dipengaruhi oleh konflik sektarianisme tidak mungkin relevan bagi pendidikan karena akan memengaruhi hasil dari pelajarannya.

Maka dari itu, kita memiliki tantangan yang cukup besar untuk mempromosikan Indonesia menjadi kiblat keilmuan Islam di dunia. Sudah saatnya semua pihak aktif mendorong pemerintah menyuarakan Indonesia sebagai kiblat baru keilmuan Islam dunia. Dengan demikian, tatanan peradaban keilmuan Islam yang lebih selaras dengan perkembangan zaman di masa depan diharapkan muncul dari Indonesia. Dengan semua modal yang dimiliki, bukan hal yang mustahil bagi Indonesia untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih luhur melalui nilai-nilai dan kandungan ajaran Islam.

PENUTUP

Posisi Indonesia sebagai potret ideal dari negara demokrasi Muslim dan juga mayoritas penduduknya beragama Islam yang mampu menyelaraskan antara demokrasi dan Islam diharapkan lebih berperan lagi di kancah global. Banyak kalangan berharap Indonesia dapat memainkan peranan yang lebih besar, apalagi setelah Amerika dan India, Indonesia dinilai sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Peranan itu bisa berupa menyebarkan pemahaman dan pengamalan Islam *wasatiyah* sekaligus memberdayakan demokrasi di negara-negara Muslim lain. Karena itu pengembangan demokrasi di Indonesia menjadi keniscayaan dalam rangka perbaikan dan memberi kontribusi yang lebih nyata sebagai contoh ideal negara Muslim paling demokratis di dunia. Sejauh ini, proses politik telah memberikan cukup banyak harapan. Meski demikian, agenda-agenda politik ke depan harus lebih berkualitas sehingga dapat menjadi *role model* sekaligus bermakna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, bukan lagi Indonesia yang mesti berkiblat ke Timur Tengah, tetapi mereka yang harus berkunjung ke Indonesia menikmati iklim perdamaian dan cakrawala keindahan Islam serta menyerap oksigen

keberagaman dan perdamaian dalam bingkai kebersamaan. Agama-agama besar di Indonesia bisa jadi datang dari negara dan wilayah seberang, namun bukan berarti Indonesia tidak memiliki budaya dan peradaban yang telah tumbuh ribuan tahun lalu. Justru peradaban Indonesia merupakan bagian dari palung penghayatan yang bersenyawa dengan ajaran Islam itu sendiri. Gus Dur menyebutnya dengan “pribumisasi Islam”.¹⁶ Islam diharapkan membumi agar umat beragama tak terlepas dari akar kesejarahannya sehingga persoalan agama bukan selalu mengincar fantasi silam milik bangsa lain, melainkan menggali kekayaan khazanah falsafah milik peradaban kita sendiri.

¹⁶Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institut, 2006), 243

TURNITIN-ISLAM INDONESIA: THE ORIENTATION OF WORLD ISLAMIC STUDIES AND CONTRIBUTION TO GLOBAL CIVILIZATION

ORIGINALITY REPORT

17 %	17 %	7 %	7 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pt.scribd.com Internet Source	4 %
2	www.scribd.com Internet Source	3 %
3	rusdipost.blogspot.com Internet Source	1 %
4	abduazis.wordpress.com Internet Source	1 %
5	qdoc.tips Internet Source	1 %
6	media.neliti.com Internet Source	1 %
7	ridhoalhamdi.id Internet Source	1 %
8	minerva-access.unimelb.edu.au Internet Source	1 %
9	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %

10	epdf.pub Internet Source	1 %
11	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1 %
12	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
13	anzdoc.com Internet Source	<1 %
14	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
15	nicmcr.org Internet Source	<1 %
16	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
17	id.scribd.com Internet Source	<1 %
18	www.bildung-weltweit.de Internet Source	<1 %
19	abduhaliknas.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	graduate.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
21	masykuriabdillah.lec.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
22	archive.org Internet Source	<1 %

23

lib.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

24

repositorioslatinoamericanos.uchile.cl

Internet Source

<1 %

25

www.kemkes.go.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off